

**PENETAPAN SASARAN PENERIMA PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP)  
DALAM KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) SAIYO  
SAKATO JORONG DATA NAGARI TABEK PATAH KECAMATAN  
SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR**

**OLEH**

**SYAFRIYANTI  
06 115 005**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

**PENETAPAN SASARAN PENERIMA PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP)  
DALAM KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) SAIYO  
SAKATO JORONG DATA NAGARI TABEK PATAH KECAMATAN  
SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji proses penetapan sasaran penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) tahun 2008-2009 dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Saiyo Sakato Jorong Data Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2010 hingga Juni 2010. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan proses penetapan sasaran penerima PNPM-MP dalam Kelompok SPP Saiyo Sakato; dan (2) menganalisa faktor yang berkoeksistensi dengan ketidaktepatan sasaran penerima PNPM-MP tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan desain studi kasus (*Case Study*). Sumber data adalah dari responden secara sensus dari 25 orang anggota kelompok SPP Saiyo Sakato, dan informan kunci yang terdiri dari Wali Nagari, Wali Jorong, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pemuka Masyarakat, sejumlah masyarakat miskin diluar kelompok, Fasilitator Kecamatan. Data sekunder berupa dokumen yang di peroleh dari Kantor Camat, Kantor Wali Nagari, BPS dan buku-buku teks.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada sejumlah mekanisme yang tidak dijalankan sesuai dengan rencana seperti kegiatan identifikasi RTM yang terdapat dalam tahap musyawarah jorong dan peninjauan kembali ke kelompok oleh Tim Verifikasi sehingga jumlah anggota Kelompok Saiyo Sakato yang memang tepat sasaran menerima bantuan program PNPM-MP hanya 5 orang (20%) dari seluruh jumlah anggota kelompok, dan sisanya merupakan sasaran yang tidak tepat yaitu berjumlah 20 orang (80%). Sedangkan faktor yang berkoeksistensi dengan terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima program PNPM-MP dalam kelompok SPP ini terlihat dari dua faktor yaitu: (1) Faktor yang berasal dari sasaran, sehubungan dengan: (a) persepsi dan kebiasaan RTM, yaitu adanya ketergantungan RTM yang tinggi pada program yang sifatnya lebih kepada bantuan sosial dengan alasan bahwa RTM tersebut tidak akan terbebani untuk harus mencicil hutang setiap bulannya seperti program PNPM-MP dalam kegiatan SPP tersebut; dan (b) pengunduran diri RTM dari kelompok akibat rasa terbebani sebagai sasaran karena perasaan malu jika mereka tidak mampu membayar cicilan pinjaman itu setiap bulannya dan kebijakan kelompok yang kurang relevan dan keluar dari ketentuan dasar kegiatan SPP; (2) Faktor yang berasal dari pendamping, sehubungan dengan: (a) pelaksanaan sosialisasi yang tidak menyeluruh oleh KPMD; (b) Tim Verifikasi yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik; dan (c) kurangnya pengawasan oleh Tim Pengawas dalam setiap pelaksanaan tahapan kegiatan SPP.

Disarankan agar seluruh pelaku khususnya Tim Pengawas dalam kegiatan SPP ini lebih berdisiplin untuk menjalankan mekanisme yang sesuai dengan juknis sehingga ketidaktepatan sasaran dapat dihindari.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada tahun 1998 badai krisis menerpa Indonesia yang meluas menjadi krisis ekonomi dan politik yang menyebabkan terjadinya keguncangan dasar perekonomian nasional sehingga mengakibatkan terjadinya ledakan pengangguran. Merosotnya daya beli masyarakat mengakibatkan semakin sulitnya memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan maupun akses kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan. Semua ini akhirnya menyebabkan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan mengalami peningkatan (Sumodiningrat, 1999).

Terjadinya krisis ekonomi juga telah membawa dampak yang besar terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin dan menurunnya taraf hidup sebahagian kelompok masyarakat dibandingkan dari keadaan sebelumnya. Meningkatnya jumlah masyarakat miskin baik di daerah perkotaan maupun pedesaan merupakan fenomena sosial yang harus diperhatikan secara serius. Berdasarkan perkiraan Badan Pusat Statistik pada akhir tahun 2007 jumlah penduduk miskin 37,17 juta jiwa atau 16,58% dari penduduk Indonesia dan 63,52 berada di pedesaan (BPS 2007).

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah habis dan terus berlanjut dari waktu ke waktu hingga sampai saat ini. Dalam kehidupan masyarakat modern sekalipun, masalah kemiskinan dipahami sebagai akibat dari ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dan kemiskinan sebagai penyebab dari ketidakberdayaan tersebut.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian yaitu: kemiskinan absolut, kemiskian relatif, dan kemiskianan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau

berusaha memperbaiki tingkat kehidupan sekalipun ada usaha dari pihak lain (Nurkse, 1999).

Dalam menghadapi masalah kemiskinan maka pemerintah terus berupaya untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan. Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memperdayakan rakyat untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian politik, sosial dan ekonomi.

Setiap Departemen Teknis selalu mempunyai program pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk dapat mengurangi bahkan mengentaskan masyarakat miskin. Meskipun masyarakat miskin tersebut telah mendapatkan program pengentasan kemiskinan, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat miskin yang telah tersentuh program tetap saja tidak beranjak dari kondisi kemiskinannya (Elfindri, 2008).

Adopsi sistem penanggulangan kemiskinan secara statis melalui program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), sampai dengan pembagian kartu keluarga miskin untuk kepentingan pengobatan gratis dan beras untuk rakyat miskin (raskin) hanya dapat memecahkan persoalan kemiskinan jangka pendek. Mengingat ketika program telah berakhir, masyarakat miskin masih memerlukannya. Selain itu lemahnya dalam pemilihan target group (kelompok sasaran) suatu program menjadikan program tersebut sering tidak pada sasaran yang seharusnya menerima dan memanfaatkan program tersebut (Elfindri, 2008).

Sementara sistem penanggulangan secara dinamis berupa pengembangan usaha produktif serta bentuk dukungan kelembagaan dan pendampingan diduga sering mengalami kendala yang mana program-program kemiskinan ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat non-miskin. Ada beberapa indikasi yang menyebabkan persoalan tersebut diantaranya: lemahnya data base kemiskinan itu, penetapan indikator yang bervariasi antara instansi terkait, ditemukannya indikasi penyimpangan oleh petugas pelaksana program, dan kurangnya partisiatif masyarakat. Empat hal inilah yang dominan ditemukan dalam penyebab kesalahan penetapan target group yang akan menerima bantuan kemiskinan (Elfindri, 2008)

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka kesimpulan yang didapat adalah:

1. Pada kelompok SPP Saiyo Sakato terjadi ketidaktepatan sasaran, dimana dari 25 orang jumlah anggota kelompok yang menerima bantuan program PNPM-MP 20 diantaranya adalah Non Miskin atau sebesar 80% dan hanya 5 orang (20%) yang merupakan RTM. Banyaknya salah sasaran ini berpangkal pada proses penetapan sasaran yaitu ada sejumlah mekanisme yang tidak dijalankan sesuai dengan rencana seperti kegiatan identifikasi RTM yang terdapat dalam tahap musyawarah jorong dan peninjauan kembali ke kelompok oleh Tim Verifikasi. Dari sini terlihat bahwa kurang bagusnya kinerja para pelaku seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Tim Verifikasi dan Tim pengawas padahal pada proses sosialisasi dan pelatihan telah dijelaskan bagaimana alur dan tatacara serta sanksi bagi yang melanggar dalam setiap kegiatan SPP termasuk dalam proses penetapan sasaran penerima program itu sendiri.
2. Faktor-faktor yang berkoeksistensi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan proses penetapan sasaran penerima program PNPM-MP dalam kegiatan SPP adalah:
  - a. Faktor yang berasal dari sasaran, sehubungan dengan:
    1. Persepsi dan kebiasaan RTM, yaitu adanya ketergantungan RTM yang tinggi pada program yang sifatnya lebih kepada bantuan sosial dengan alasan bahwa RTM tersebut tidak akan terbebani untuk harus mencicil hutang setiap bulannya seperti program PNPM-MP dalam kegiatan SPP tersebut.
    2. Pengunduran diri RTM dari kelompok akibat,
      - a. Rasa Terbebani sebagai sasaran  
perasaan malu jika mereka tidak mampu membayar cicilan pinjaman itu setiap bulannya, dan;

## DAFTAR PUSTAKA

- Adra, Donal. 2009. *Kontibusi Pendapatan Usaha Ternak Kambing Terhadap Pendapatan Usaha Tani di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang*. Skripsi. Fakultas Perternakan Universitas Andalas. Padang.
- Alfisyahrin. 2002. *Analisis Kegiatan Kelompok Masyarakat dalam Mengelola Dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun anggaran 1998/1999. Studi Kasus Pokmas Pedagang Komoditi Pertanian Penerima Dana Bantuan PPK tahun anggaran 1998/1999 Di Desa Naggalo Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi. Fakultas pertanian universitas andalas. Padang.
- Aryati, Diah. 2003. *Perbandingan Total Kemiskinan Versi Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia dengan Peran Strategis Dari Usaha Mikro Untuk Penganantasan Kemiskinan*. Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma. Margondajaya no.10 Depok.
- BPS. 2008. *Dalam Angka 2008*. Kabupaten Tanah Datar.
- BPS. 2009. *Dalam Angka 2009*. Kabupaten Tanah Datar.
- Darwanto, Harry. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasiskan Masyarakat Terpencil*. <http://www.bappenas.go.id>. (2 Maret 2008).
- Departemen Pekerjaan Umum. 2007. *Pedoman Umum PNPM*. Direktorat Jendral Cipta Karya: Jakarta
- Elfindri, Dkk. 2008. *Strategi Sukses Membangun Daerah*. Gorga Media.
- Erwalis. 2005. *Kebun dan Perkebunan Besar Kelapa Sawit Dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Sekitar*. [tesis].. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. 108 hal. Padang
- Gusnita, Wilda. 2007. *Analisis Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Melalui Pinjaman Modal Bergulir di Kota Payakumbuh*. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.
- Hadi, Agus Purbathin. 2008. *Memberdayakan Masyarakat (Menggerakkan Masyarakat Ke Arah Masyarakat Aktif)* <http://oceannaz.wordpress.com/2010/07/29/memberdayakan-masyarakat-menggerakkan-masyarakat-ke-arah-masyarakat-aktif/>
- Hulmizan, Rudi. 2009. *Analisis Pelaksanaan Program Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar*. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang.